

**KINERJA PROGRAM DINAS PENDIDIKAN DI ERA  
OTONOMI DAERAH**  
(Kasus Pada Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi Tahun 2006-2007)

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

AFRIANI  
04193041



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**



## ABSTRAK

**Afriani. 04 193 041. KINERJA PROGRAM DINAS PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2007). Pembimbing : DR. Asmawi, MS dan Drs. Syaiful, M.Si.**

Penelitian ini mendeskripsikan Kinerja Program Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi di Era Otonomi Daerah khususnya pada Tahun 2006-2007. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep otonomi daerah dan desentralisasi, desentralisasi pendidikan dan kinerja. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara langsung tidak berstruktur dan dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan di lapangan diperoleh data bahwa Kinerja Program Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi di Era Otonomi Daerah Tahun 2006-2007 yaitu pada program manajemen pelayanan pendidikan serta program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah tingkat menengah, dinilai sudah cukup baik. Untuk program manajemen pelayanan pendidikan, hal ini terbukti dengan terjadinya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan di Kota Bukittinggi dengan sudah disusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan untuk Tahun 2006-2010 yang mana pada tahun sebelumnya yaitu 2001-2005, Kota Bukittinggi belum memiliki SPM sendiri. Capaian kinerja pun semakin baik karena sudah 90% sesuai dengan SPM 2006-2010 yang telah ditetapkan. Selain itu tingkat partisipasi riil masyarakat dalam bidang pendidikan juga semakin meningkat. Untuk program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah guru yang telah disertifikasi sejak tahun 2006, adanya kegiatan pertukaran guru tingkat sekolah menengah ke luar negeri yang tentu saja akan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bukittinggi.

Kasus ini memperlihatkan bahwa desentralisasi pendidikan telah membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di daerah. Dinas Pendidikan sebagai unit pelaksana teknis pemerintah daerah di bidang pendidikan telah membuat program pendidikan yang melibatkan stakeholder pendidikan dan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerahnya.

## ABSTRAK

Afriani. 04 193 041. **KINERJA PROGRAM DINAS PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2007)**. Pembimbing : DR. Asmawi, MS dan Drs. Syaiful, M.Si.

Penelitian ini mendeskripsikan Kinerja Program Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi di Era Otonomi Daerah khususnya pada Tahun 2006-2007. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep otonomi daerah dan desentralisasi, desentralisasi pendidikan dan kinerja. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara langsung tidak berstruktur dan dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan di lapangan diperoleh data bahwa Kinerja Program Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi di Era Otonomi Daerah Tahun 2006-2007 yaitu pada program manajemen pelayanan pendidikan serta program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah tingkat menengah, dinilai sudah cukup baik. Untuk program manajemen pelayanan pendidikan, hal ini terbukti dengan terjadinya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan di Kota Bukittinggi dengan sudah disusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan untuk Tahun 2006-2010 yang mana pada tahun sebelumnya yaitu 2001-2005, Kota Bukittinggi belum memiliki SPM sendiri. Capaian kinerja pun semakin baik karena sudah 90% sesuai dengan SPM 2006-2010 yang telah ditetapkan. Selain itu tingkat partisipasi riil masyarakat dalam bidang pendidikan juga semakin meningkat. Untuk program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah guru yang telah disertifikasi sejak tahun 2006, adanya kegiatan pertukaran guru tingkat sekolah menengah ke luar negeri yang tentu saja akan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bukittinggi.

Kasus ini memperlihatkan bahwa desentralisasi pendidikan telah membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di daerah. Dinas Pendidikan sebagai unit pelaksana teknis pemerintah daerah di bidang pendidikan telah membuat program pendidikan yang melibatkan stakeholder pendidikan dan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerahnya.

Soeharto untuk melakukan indoktrinasi terhadap rakyat<sup>3</sup>.

Sebagai contoh dalam hal dana instruksi presiden (inpres) pada masa Soeharto. Tujuan dasar dana inpres, yaitu agar bisa menanggulangi kemiskinan, dengan penyaluran dana inpres untuk pendidikan (pembangunan SD inpres). Akan tetapi yang terjadi dalam pelaksanaannya justru lebih banyak muatan politiknya, yaitu untuk memberi "hadiah" bagi wilayah di mana pemerintah akan bisa memperoleh dukungan politik yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena kategori penyaluran dana yang tak jelas dan abstrak. Kondisi ini merupakan dampak dari fokus pembangunan pada masa Orde Baru yang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi daripada pembangunan manusianya. Departemen Pendidikan pun akhirnya menjadi kementerian yang termarginalisasi dibandingkan dengan departemen lain. Hasilnya, pada akhir masa Orde Baru, pendidikan justru mengingkari kebhinekaan sebagai potensi kekayaan dan keragaman budaya di Indonesia bahkan sebagai falsafah bangsa Indonesia<sup>4</sup>. Pengelolaan pendidikan pada orde baru telah berdampak buruk pada kinerja pendidikan kita sekarang ini.

Otonomi daerah, telah mengubah struktur pemerintahan di daerah. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan kepada kita semua mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Hal tersebut terlihat bahwa daerah memiliki hak untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab serta dilaksanakan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah tersebut. Termasuk pula di dalamnya berbagai

<sup>3</sup> <http://www.lpem.org/item.php?id=77&type=2>

<sup>4</sup> Sebagaimana dikutip oleh Sam M Chan dan Tuti T Sam dalam H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Rineka cipta. Jakarta. 2000, hal 2-4

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dinas pendidikan merupakan unsur pelaksana teknis daerah dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan. Koordinasi antara dinas Pendidikan Kota Bukittinggi dengan Dewan pendidikannya berjalan dengan baik. Masing-masing pihak mengetahui dengan baik akan tugas dan fungsi mereka sehingga tercipta iklim komunikasi yang harmonis. Program kerja yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan kemudian diberitahukan kepada Dewan Pendidikan. Dewan pendidikan kemudian akan menyaring aspirasi dari masyarakat dan sekolah-sekolah, jika kemudian terdapat keluhan atau hal-hal yang kurang berkenan, maka dewan pendidikan mengundang Dinas Pendidikan untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang dimaksud.

Hasil temuan dilapangan memperlihatkan bahwa kinerja pelaksanaan program-program pendidikan yang telah disusun oleh dinas Pendidikan berjalan dengan cukup baik, khususnya program manajemen pelayanan pendidikan serta program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan-kegiatan pelaksana dari dua program tersebut dapat dijalankan dengan baik. Ketersediaan jumlah pendidik secara kuantitas sudah memadai dan secara kualitas secara bertahap sudah ditingkatkan, dengan persentasenya 70% sudah memiliki sertifikasi. Akan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ali Riyadi, Ahmad, *Politik Pendidikan, Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Ar-Ruzz. Yogyakarta, 2006.
- Amnur, Ali Muhdi, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta, Pustaka Fahima, 2007.
- Bungin, Burhan *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah, Filosofi,, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2005.
- John W. Cresswell, *Research Design, qualitative and Quantitative Approaches*, Jakarta, KIK Press.
- Moleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grasindo, 2005.
- Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sam M. Chan dan Tuti T Sam. *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sirozi, M. *Politik Pendidikan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2005,
- Suparno, Paul. *Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi*. Yogyakarta , Kanisius, 2005.
- Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional*, Jakarta, PSAP Muhammadiyah, 2006.